

Penutup Bangkai

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus
dari Universitas Monash, Australia



Secerdik apa pun bangkai gajah ditutup daun, bau anyirnya tercium juga. Pepatah itu mengingatkan kita pada dua peristiwa. Pertama, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang minggu-minggu ini sedang "uji publik". Kedua, agresi militer pertama (1947) oleh Belanda dalam minggu-minggu ini 78 tahun lalu.

Menteri Kebudayaan (Menbud) mengaku tak ada intervensi pemerintah dalam proyek penulisan ulang sejarah. Anehnya, dia sendiri yang selama ini paling banyak bicara mewakili proyek mereka dalam debat publik. Bukan sejarawan dari tim penulisan.

Menulis sejarah itu bagian dari kerja rutin ahli sejarah sepanjang karier, tanpa menunggu ada proyek bikin politik. Jika tim penulisan sejarah yang sekarang diangkat pemerintah, apa yang dimau? Apa kriteria pemilihan anggota tim itu. Pernahkah ada undangan terbuka bagi para sejarawan untuk terlibat? Adakah upaya menghindari potensi konflik kepentingan di antara mereka yang dipilih, pihak yang memilih dan topik yang ditulis? Ada buktinya?

Jika integritas proyek itu hendak diuji publik secara jujur, adil, dan etis, seharusnya pemerintah menjadi pihak yang diuji. Seharusnya peran pemerintah bukan sebagai pelaksana uji publik, mengatur tempat, jadwal, dan formatnya. Yang diuji seharusnya bukan cuma teks sejarah versi baru, melainkan juga seluruh prosedur proyek.

Jika uji publik menerima masukan, bagaimana masukan itu disaring dan ditimbang? Masukan mana yang diikuti? Mana yang diabaikan? Apa alasannya? Apakah

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-4)

(Sambungan dari halaman 1)

proses itu terbuka untuk publik? Jika semua aspek itu terselembung misteri, proyek kontroversial ini layak dijadikan obyek penelitian skripsi mahasiswa.

Sebelum kontroversi penulisan sejarah, ada polemik pengesahan Undang-Undang TNI dan usulan agar mantan Presiden Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Seakan-akan semua itu belum cukup, Menbud menyangkal pemerkosaan "massal" 1998 dan menganggapnya sebagai rumor. Lalu kontroversi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Wajar jika ada

yang bercuriga semua ini blunder sistematis dari elite politik untuk menyeret Indonesia mundur ke masa kejayaan Orde Baru.

Minggu ini 78 tahun lalu Belanda melancarkan agresi militer pertama. Tujuannya, menyeret Indonesia mundur kembali ke masa kolonial Belanda. Dalam sejarah resmi Belanda, agresi militer itu dinarasikan dengan *tone* positif sebagai "tindak politisional" (*polititionele acties*).

Agresi militer Belanda blunder besar yang menyulut kontroversi global. Sebelum agresi Belanda, kedaulatan Indonesia tidak diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Belanda dianggap ma-

sih berwenang atas wilayah bekas jajahannya. Berbagai gelombang bersenjata pasca-proklamasi 1945 di negeri ini dikatakan Belanda sebagai "urusan dalam negeri" yang tidak boleh dicampuri negara lain.

Gara-gara agresi militer Belanda, sejumlah negara bersimpati kepada Indonesia. Apalagi setelah agresi militer kedua (1948-1949). Kolonialisme Belanda tidak lagi diuji publik di Belanda, tetapi dikuliti habis di sidang PBB. Berkat dukungan banyak negara untuk Indonesia, Belanda terpaksa menyerahkan kedaulatan penuh bekas jajahannya kepada Indonesia, kecuali Papua.

Agresi seksual "massal" terhadap etnis Tionghoa pada Mei 1998 memicu arus balik terhadap sejarah panjang kekerasan anti-Tionghoa berskala besar (lebih dari sehari, meliputi satu atau lebih kota besar). Sebelum 1998, kekerasan anti-Tionghoa terjadi rutin dan berkala sejak masa kolonial, semasa pemerintahan Sukarno dan terlebih lagi di masa Orde Baru. Namun, Mei 1998 berbeda secara radikal dari semua yang terdahulu.

Pertama kali dalam sejarah RI, sejak Mei 1998 warga non-Tionghoa beramai-ramai mengancam keras tradisi kekerasan rasial. Tidak hanya bersimpati secara individual, sebagian dari mereka meng-

organisasi bantuan terlembaga bagi para korban selama dan sesudah Mei 1998. Mereka bersaksi dan menuntut keadilan. Bahkan, mereka mempertaruhkan keselamatan sendiri dan keluarga dari berbagai ancaman teror berkelanjutan. Teror dari mana? Belum terbukti secara hukum, tetapi mudah ditebak sendiri.

Menbud menolak istilah "massal" dalam "pemerkosaan massal" Mei 1998. Saya juga, tetapi dengan alasan bertolak belakang. Baginya, jumlah korban Mei 1998 kecil. Ia membandingkannya dengan

kasus-kasus lain dari perang berkelanjutan antarnegara. Betapa konyol. Jika ia menganggap Indonesia pada Mei 1998 dalam kondisi perang, militer RI berperang melawan siapa?

Korbannya lebih dari 1.000 nyawa. Ada lebih dari 100 kasus pemerkosaan dan berbagai siksaan seksual. Puluhan mal dan ribuan toko dibakar dengan bahan ledak berkekuatan besar yang hanya dimiliki pasukan tempur dan dipakai untuk perang.

Angka korban dan kerusakan bisa diperdebatkan. Yang tidak terbantahkan: kekerasan itu berlangsung lebih dari 50 jam di beberapa kota besar di masa damai, tanpa hambatan dari aparat keamanan. Semua ini terjadi di negeri yang dikuasai rezim militer tiga dekade dengan komando teritorial berlapis.

Agresi Mei 1998 adalah teror terstruktur, sistematis, dan masif, dengan strategi dan sarana perang, organisasi, serta tenaga terlatih yang hanya dimiliki aparat keamanan negara. Kita harus berhenti menyebutnya "huru-hara" atau "kerusuhan", dengan asumsi sesat bahwa penyebab utamanya kebencian rasial satu kelompok etnis terhadap yang lain.

Hingga kini, tidak tampak niat serius penegak hukum memburu apalagi mengadili mereka yang secara struktur kelembagaan paling bertanggung jawab atas keamanan nasional. Yang ada impunitas dan penyangkalan berkelanjutan.

Agresi militer Belanda tidak pernah diadili secara hukum. Bukan berarti agresi itu cuma rumor. Bangkai teror negara bisa ditutup daun propaganda, tetapi bau anyirnya akan terus menusuk hidung. Pejabat negara RI perlu merdeka dari mental penjajah dalam tempo sesingkat-singkatnya.